



ISU KEAMANAN DI SEMENANJUNG KOREA

Simela Victor Muhamad*)

Abstrak

Isu keamanan di Semenanjung Korea kembali memanas setelah Korea Utara melakukan uji coba peluncuran rudal balistik antarbenua pada 4 Juli 2017. Situasi keamanan di Semenanjung Korea yang kembali memanas tidak dapat dilepaskan dari belum berakhirnya Perang Korea dengan kesepakatan damai dan akibat aksi-aksi provokatif dari para pihak yang saling "berlawanan" (Korea Utara versus Korea Selatan dan AS). Dalam konteks keamanan kawasan, situasi keamanan di Semenanjung Korea yang diwarnai oleh nuansa realis dengan power-nya itu bisa mengancam stabilitas kawasan, dan oleh karena itu cara-cara damai melalui perundingan untuk mengatasi situasi keamanan di Semenanjung Korea yang belum kondusif ini perlu terus dilakukan.

Pendahuluan

Dalam beberapa hari terakhir media kembali menyoroti isu keamanan yang terjadi di Semenanjung Korea. Sebabnya, Korea Utara yang kembali melakukan uji coba rudal balistik antarbenua (*Intercontinental Ballistic Missile/ICBM*) mendapat reaksi keras dari masyarakat internasional, termasuk Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), karena menjadikan situasi keamanan di Semenanjung Korea yang belum kondusif semakin memanas. Uji coba rudal balistik antarbenua, Hwasong-14, yang dilakukan pada 4 Juli 2017 diklaim berhasil oleh Korea Utara. Uji coba rudal yang jatuh di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Jepang tersebut mendapat reaksi keras Tokyo, yang menyebutnya

sebagai tindakan provokasi Pyongyang dan memberikan ancaman serius pada keamanan kawasan. Presiden Korea Selatan Moon Jae-in menyatakan, provokasi Korea Utara memaksa Korea Selatan dan Amerika Serikat (AS) menindaklanjutinya dengan latihan penyerangan bersama. ASEAN, termasuk Indonesia, juga menyesalkan uji coba rudal Korea Utara tersebut, karena dianggap tidak sejalan dengan semangat untuk menciptakan perdamaian dan stabilitas di kawasan dan dunia. Tulisan ini akan mengkaji secara singkat isu keamanan di Semenanjung Korea yang kerap mengalami situasi yang memanas dan bagaimana hal itu dilihat dalam konteks keamanan kawasan.

*) Peneliti Madya Masalah-masalah Hubungan Internasional pada Bidang Hubungan Internasional, Pusat Penelitian, Badan Keahlian DPR RI. Email: victorsimela@yahoo.co.id



Penyebab Situasi Memanas

Terlebih dahulu perlu dipahami bahwa penyebab utama situasi keamanan di Semenanjung Korea yang kerap memanas adalah status hubungan Korea Utara dan Korea Selatan itu sendiri yang secara teknis masih dalam keadaan perang, setelah Perang Korea 1950-1953 berakhir dengan gencatan senjata, bukan perjanjian damai. Situasi penuh ketidakpastian ini kemudian dimanfaatkan oleh para pihak yang saling berseteru, yakni Korea Utara versus Korea Selatan dengan dukungan AS. Situasi seperti ini pun dimanfaatkan oleh mereka untuk saling unjuk kekuatan militer yang kemudian dimaknai sebagai aksi provokasi oleh para pihak yang saling berlawanan tersebut (Oberdoffer and Robert Carlin, 2014:2-8). Situasi seperti ini dapat kita saksikan akhir-akhir ini dan menimbulkan keprihatinan internasional.

Masyarakat internasional menuding ketegangan yang kerap terjadi di Semenanjung Korea dipicu oleh aksi provokatif Korea Utara dengan uji coba peluncuran rudal (dan nuklir). Hal itu dilakukan Korea Utara, biasanya, sebagai reaksi atas latihan militer gabungan tahunan Korea Selatan dan AS. Sebagai contoh, di tengah-tengah latihan militer gabungan Korea Selatan dan AS pada Maret-April 2017, Korea Utara melakukan uji coba peluncuran rudal balistik pada minggu pertama April 2017. Meskipun uji coba rudal tersebut dianggap tidak berhasil oleh Korea Selatan, masyarakat internasional tetap mengancam keras aksi uji coba rudal Korea Utara, karena telah memicu ketegangan di kawasan. Terlebih secara terang-terangan pihak Korea Utara, melalui kementerian luar negerinya, pernah menyatakan bahwa negaranya akan mempercepat pengembangan kekuatan nuklir. Konflik di Semenanjung Korea dan ketegangan yang menyertainya memang tidak dapat dilepaskan dari isu nuklir Korea Utara.

Masyarakat internasional mungkin belum bisa melupakan ketika pada minggu pertama bulan Januari 2016, Kim Jong-un, sebagaimana diberitakan media internasional saat itu, telah memerintahkan otoritas militer Korea Utara untuk melakukan uji coba bom hidrogen, yang diketahui memiliki kekuatan ledakan yang lebih dahsyat dibandingkan bom

nuklir lainnya. Seketika itu juga kecemasan datang dari dunia internasional, termasuk China yang selama ini banyak mendukung Korea Utara. Uji coba bom hidrogen, yang diklaim berhasil oleh pemimpin Korea Utara tersebut ditujukan sebagai peringatan kepada AS, dan juga Korea Selatan, yang dianggap Pyongyang sebagai ancaman bagi keamanan Korea Utara.

Pada tahun 2017 setidaknya hingga awal Juli 2017, situasi konflik di Semenanjung Korea belum juga surut, bahkan kembali memanas. Pemerintahan Donald Trump menilai kebijakan dan sikap pemimpin Korea Utara, Kim Jong-un, turut berkontribusi dalam menciptakan situasi keamanan di Semenanjung Korea memanas, dan mendorong AS untuk mengambil sikap tegas. Sikap tegas AS tersebut terlihat antara lain ketika Presiden Trump pada pertengahan Juni 2017 memerintahkan Panglima Komando AS di Pasifik (US PACOM), Laksamana Harry Harris, dengan gugus tempur kapal induk USS Carl Vinson untuk berlayar menuju perairan Semenanjung Korea guna mengawasi secara langsung situasi keamanan di sana. Perintah Trump kepada Panglima US PACOM tersebut jelas dimaksudkan untuk mengirim pesan yang tegas kepada Korea Utara, sekaligus memberikan sinyal dukungan kepada Korea Selatan dalam menghadapi provokasi Korea Utara.

Suasana “permusuhan” memang sangat kuat mewarnai situasi di Semenanjung Korea. Bagi Korea Utara, Korea Selatan merupakan ancaman dengan kehadiran kekuatan militer AS sebagai pelindung utamanya. Bagi Korea Selatan, pengalaman invasi Korea Utara pada masa Perang Korea menunjukkan bahwa agresivitas Korea Utara untuk menyatukan Korea merupakan ancaman yang sewaktu-waktu bisa bangkit kembali. Situasi demikian mengakibatkan tidak adanya norma yang disepakati untuk mengatur hubungan di antara kedua Korea. Terlebih lagi Korea Utara, sejak terpecahnya negara Korea, berubah menjadi sebuah negara yang sangat tertutup, sehingga komunikasi antara Korea Utara dengan dunia luar, termasuk Korea Selatan, sangat kurang dan dikontrol sangat ketat. Ketegangan pun mewarnai hubungan keduanya. Ketegangan yang dipicu oleh aksi provokasi salah satu pihak terhadap pihak lainnya, ditambah program nuklir

Korea Utara yang tidak transparan, telah menimbulkan kekhawatiran masyarakat internasional dan menyebabkan situasi keamanan di Semenanjung Korea kerap memanas.

Konteks Keamanan Kawasan

Situasi di Semenanjung Korea di atas memperlihatkan bahwa keamanan di wilayah ini belum kondusif. Dunia internasional masih menyaksikan ketegangan kerap terjadi di wilayah ini, meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk meredakan ketegangan dan mencari solusi damai atas konflik di Semenanjung Korea, baik dalam kerangka solusi damai antar-Korea (Korea Utara dan Korea Selatan melalui program reunifikasi) maupun terhadap isu nuklir Korea Utara (melalui perundingan enam pihak/*six party talks*). Namun upaya damai tersebut selalu kandas di tengah jalan, karena ketidakpercayaan masih kuat menghinggapi para pihak yang saling “berlawanan”, seperti antara Korea Utara dan Korea Selatan, serta antara Korea Utara dan AS. Tidak mengherankan jika kemudian aktivitas propaganda dan retorika bernada permusuhan di antara mereka terus berlangsung. Begitu juga dengan aktivitas manuver militer sebagaimana yang terjadi akhir-akhir ini. Kemungkinan pecah perang baru di antara kedua Korea, bahkan mungkin melibatkan kekuatan negara besar lain (AS), menjadi kekhawatiran dunia, khususnya kawasan.

Dalam konteks keamanan kawasan, situasi keamanan di Semenanjung Korea yang kerap memanas tersebut jelas tidak dapat diabaikan begitu saja. Negara-negara di kawasan, khususnya Asia Timur (yang mencakup ASEAN) perlu mencermati situasi dan perkembangan itu, karena implikasi dari situasi yang tidak kondusif di Semenanjung Korea tersebut akan “menyentuh” keamanan kawasan. Korea Selatan dan Jepang, sebagai dua negara terdekat dan berada di wilayah konflik, sehari setelah peluncuran rudal balistik Korea Utara pada 4 Juli 2017, telah meminta kepada Dewan Keamanan PBB untuk segera mengadakan sidang darurat guna menyikapi krisis yang terjadi di Semenanjung Korea. Begitu juga dengan AS, yang bahkan telah mempertimbangkan opsi militer dalam menyikapi situasi keamanan di Semenanjung Korea yang kerap

memanas, yang dinilainya sebagai akibat dari aksi provokasi Korea Utara yang tidak bertanggung jawab.

Kekhawatiran negara-negara di kawasan cukup beralasan jika dikaitkan dengan kemampuan daya jangkau rudal Korea Utara yang mengalami kemajuan. Hal itu terlihat misalnya dari hasil analisis *Heritage Foundation Research* yang pernah dilakukan beberapa tahun lalu, terutama terhadap rudal Taepo Dong, dan kiranya masih cukup relevan untuk disajikan, sebagaimana terlihat dalam gambar di bawah ini.



Sumber: Washington Post and Heritage Foundation Research

Ancaman daya jangkau rudal Korea Utara tampaknya telah “memicu” AS untuk mengambil sikap yang cenderung konfrontatif terhadap Korea Utara, dan itu bisa dipahami jika dikaitkan dengan sikap Korea Utara yang akan menargetkan AS sebagai salah satu sasaran rudalnya. Namun demikian, jika dilihat dalam konteks keamanan kawasan, pendekatan konfrontatif terhadap Korea Utara dalam situasi seperti sekarang ini, di mana rezim Kim Jong-un tampak lebih sulit diterka sikap dan kebijakannya, memunculkan kekhawatiran bahwa implikasinya terhadap keamanan kawasan akan melebihi situasi pada saat Perang Korea tahun 1950-an. Pada saat itu, Korea Utara belum memiliki kekuatan persenjataan yang lebih maju seperti sekarang, atau bahkan jika benar, dengan kekuatan rudal balistik dan senjata nuklirnya.

Terlebih lagi jika diperhatikan, situasi politik-keamanan di Semenanjung Korea, dilihat dari perspektif studi hubungan internasional, seakan menyajikan arena bagi digunakannya pendekatan realis yang mengedepankan kekuatan militer (*power*) dalam aktivitas hubungan internasionalnya (Donnelly, 2000: 6-7). Dalam situasi seperti ini, saling unjuk kekuatan tidak dapat dihindarkan, sehingga potensi bagi terjadinya konflik sangat mungkin terjadi, karena masing-masing pihak bersikeras dengan kebijakan *power*-nya. Dalam konteks keamanan kawasan, situasi seperti ini perlu disikapi dengan bijak oleh negara-negara di kawasan, karena sekali mengambil langkah “perang”, situasinya akan membahayakan dan mengancam keamanan kawasan.

Pendekatan dengan cara-cara damai dalam merespons isu keamanan di Semenanjung Korea tetap harus menjadi pilihan utama. Berkembangnya situasi realis yang mengedepankan pendekatan *power*, tidak seharusnya disikapi dengan pendekatan *power* juga oleh negara-negara di kawasan yang peduli pada terciptanya stabilitas keamanan di Semenanjung Korea. Cara-cara damai melalui jalan perundingan, meskipun saat ini belum menemukan formula yang tepat, harus terus didorong, karena proses perundingan pernah dilakukan pada masa-masa rezim Korea Utara terdahulu, meskipun kemudian berhenti dan mengalami kebuntuan hingga saat ini.

Penutup

Situasi keamanan di Semenanjung Korea yang diwarnai oleh nuansa realis yang mengedepankan pendekatan *power* bisa mengancam stabilitas kawasan. Oleh karena itu cara-cara damai melalui perundingan untuk mengatasi situasi keamanan di Semenanjung Korea yang belum kondusif ini perlu terus dilakukan. Negara-negara di kawasan, termasuk negara-negara ASEAN (dan Indonesia di dalamnya), tidak boleh tinggal diam dan abai akan situasi yang terjadi di Semenanjung Korea. Sebagaimana pernah dikemukakan Presiden Joko Widodo dalam KTT ke-30 ASEAN di Manila pada April 2017, stabilitas dan perdamaian di Semenanjung Korea harus segera dikembalikan dan ASEAN harus

ambil bagian untuk meredakan ketegangan di kawasan tersebut. Artinya, forum-forum regional harus dimanfaatkan secara optimal untuk mencari solusi damai atas isu keamanan di Semenanjung Korea jika perdamaian dan stabilitas kawasan ingin tetap terjaga.

Referensi

- Donnelly, Jack. (2000). *Realism and International Relations*. United Kingdom: Cambridge University Press.
- Oberdorfer, Don and Robert Carlin. (2014). *The Two Koreas*. New York: Publisher Basic Books.
- “Missile test add pressure on Trump over North Korea”, *The Jakarta Post*, 4 Juli 2017, p. 10.
- “North Korea missile test a threat to international peace, EU says”, *The Jakarta Post*, 5 Juli 2017, p.11.
- “AS-Korsel Membalas Korut”, *Kompas*, 6 Juli 2017, hlm. 8.
- “U.S. Set to Act Alone on Pyongyang”, *The Wall Street Journal*, 11 Juli 2017, p. 1.
- “Jokowi: Perdamaian di Semenanjung Korea Harus Segera Dikembalikan”, *Kompas.com.*, 30 April 2017, <http://nasional.kompas.com/read/2017/04/30/09122171/jokowi.perdamaian.di.semenanjung.korea.harus.segera.dikembalikan>, diakses 3 Juli 2017.
- “10 Fakta Seputar Bom Hidrogen”, *National Geographic Indonesia*, <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/01/10-fakta-seputar-bom-hidrogen>, diakses 5 Juli 2017.
- “Indonesia Sangat Sesalkan Uji Coba Rudal Korea Utara”, *Kemlu.go.id.*, 5 Juli 2017, <http://www.kemlu.go.id/id/berita/Pages/Indonesia-Sangat-Sesalkan-Uji-Coba-Rudal-Korea-Utara.aspx>, diakses 6 Juli 2017.
- “New North Korean Missile Unit Reflects Growing Missile Threat”, *Heritage.org.*, <http://www.heritage.org/asia/report/new-north-korean-missile-unit-reflects-growing-missile-threat>, diakses 10 Juli 2017.